

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh suatu daerah tidak terlepas dari kondisi dan potensi sumber daya yang ada di daerah serta hasil evaluasi yang dilakukan terhadap pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode sebelumnya. Identifikasi terhadap permasalahan pembangunan dilakukan untuk menentukan isu-isu strategis yang relevan sebagai acuan untuk menentukan program prioritas pembangunan daerah yang tepat, sehingga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Permasalahan pembangunan pada dasarnya disebabkan oleh terjadinya perbedaan atau kesenjangan (*gap*) pencapaian antara kinerja pembangunan yang dicapai dengan yang telah direncanakan, serta antara apa yang ingin dicapai dimasa mendatang dengan kondisi yang ada saat ini.

Program prioritas pembangunan dirumuskan berdasarkan permasalahan dan isu strategis. Berkaitan dengan hal itu, maka identifikasi dan rumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis sangat memperhatikan cakupan efek dari masalah, intensitas kemunculan masalah dalam masyarakat dari efek beruntun yang berpengaruh pada kinerja sektor lain, dan adanya kecenderungan untuk meningkatkan pembangunan tapi menimbulkan dampak negatif pada pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang.

4.1 Permasalahan Pembangunan Kota Padang Panjang

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara sasaran pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat perencanaan pembangunan dilaksanakan. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan daerah. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan kondisi objektif daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan daerah.

Permasalahan utama pembangunan Kota Padang Panjang selanjutnya dijabarkan ke dalam beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

a. Belum optimal dan stabilnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi

Hal ini terbukti dari perkembangan pertumbuhan ekonomi yang berfluktuasi dan malahan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir. Selama periode 2013-2017 pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang dibawah 6% tiap tahun. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang tidak menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Disamping itu masalah pemerataan pembangunan ekonomi yang ditunjukkan oleh angka Gini Ratio ternyata angkanya juga berfluktuasi, namun pada tahun 2017 angkanya sudah relatif rendah yakni 0,30. Angka gini rasio yang sudah rendah ini perlu dipertahankan secara berkelanjutan dimasa mendatang.

Tidak stabilnya pertumbuhan ekonomi dan cenderung relatif menurun disebabkan karena masih rendahnya kontribusi sektor unggulan daerah seperti sektor perdagangan, sektor industri, sektor pariwisata dan sektor pertanian.

Adapun akar permasalahan belum optimalnya kontribusi sektor unggulan daerah di Kota Padang Panjang antara lain:

1) Permasalahan Pengembangan Pasar dan Kawasan Perdagangan.

Kondisi Pasar Pusat yang telah dibangun dan telah beroperasi tentunya belum berjalan dengan optimal karena masih ada sarana prasarana yang perlu dilengkapi agar tercapai pasar yang ber SNI sehingga dapat mewujudkan kondisi pasar yang sehat dan nyaman buat masyarakat untuk melakukan aktifitas perdagangan. Selain itu pasar ini juga perlu dikelola dengan profesional sehingga kondisi pasar dapat lebih representative. Untuk mewujudkan pasar sehat juga perlu dilakukan penertiban dan penataan disekitar lingkungan pasar. Kondisi saat ini kondisi pasar masih belum tertata dengan baik.

Selain dari pasar pusat, Kota Padang Panjang juga memiliki Pasar Induk hasil pertanian Bukit Surungan. Permasalahan utama di pasar ini adalah belum adanya kejelasan mengenai pengelolaan pasar tersebut. Disamping itu lahan untuk bongkar muat barang yang menjadi syarat utama bagi sebuah pasar induk masih sangat terbatas, areal bagi pedagang kaki lima atau pedagang musiman/petani yang menggelar hasil panennya masih minim dan belum tertata rapi sehingga kesan semrawut masih dominan.

2) Permasalahan dalam Pengembangan Kepariwisata

Kota Padang Panjang memiliki potensi wisata yang cukup bervariasi. Namun belum semua tergarap dengan baik, di antaranya

adalah Masjid Asasi di Sigando sebagai objek wisata agama serta beberapa pesantren ternama yang memiliki historis sebagai tempat mendidik para pejuang dan ulama, kawasan SMA Super Unggul sebagai objek pendidikan. Pemandian Lubuk Mata Kucing memiliki sumber air jernih. Namun semua itu belum dikelola secara optimal sebagai objek-objek yang bernilai kepariwisataan. Peluang untuk menumbuhkan dan membangun objek wisata baru perlu terus dilakukan, sepanjang hal itu memungkinkan dan peluangnya terbuka luas. Sekecil apapun peluang, untuk lokasi-lokasi yang bernilai wisata, perlu dilakukan sentuhan program pembangunan kepariwisataan, supaya lokasi tersebut bernilai dan layak untuk dijadikan sebagai objek wisata.

Beberapa lokasi yang memungkinkan diantaranya kawasan sungai andok, yang saat ini menjadi tempat pembuangan sampah akhir. Di pinggang bukit di kawasan tersebut terdapat Goa Batu Batirai, yang sudah memiliki masterplan, namun belum dibangun sebagai objek wisata yang pantas dikunjungi. Termasuk juga pengembangan dan pembangunan objek wisata air terjun tujuh tingkat di Kelurahan Silaing Bawah yang bisa dicapai dari gerbang kota.

Permasalahan lainnya terkait dengan pengembangan pariwisata di Kota Padang Panjang adalah permasalahan promosi yang belum optimal, sehingga belum sepenuhnya pariwisata Padang Panjang dikenal dan menjadi tujuan wisata.

3) Permasalahan dalam Pengembangan Pertanian

Mengelola usaha di bidang pertanian merupakan kegiatan yang cukup dominan dilakukan oleh masyarakat Kota Padang Panjang. Kondisi yang ada saat ini adalah tingginya tingkat kebutuhan akan lahan pertanian, sementara areal yang layak untuk diolah sangat terbatas. Setiap tahun luas lahan pertanian di Kota Padang Panjang terus mengalami penurunan akibat alih fungsi lahan. Diperkirakan lahan pertanian mengalami penyusutan rata-rata sebesar 6,6 Ha setiap tahun. Lahan sawah yang tersisa berkisar pada angka 630 Ha (BPS). Sebagian besar diantaranya berada di Kecamatan Padang Panjang Timur. Sedangkan di Kecamatan Padang Panjang Barat, keberadaan lahan pertanian terutama sawah mulai hilang. Perubahan fungsi lahan ini, hendaknya menjadi pemikiran untuk mengembangkan usaha-usaha pertanian yang bernilai ekonomi tinggi, seperti pertanian organik untuk beberapa produk pangan

atau palawija, pengembangan tanaman hias, atau jenis-jenis lain yang memang secara ekonomi akan menguntungkan bagi petani.

Selain pertanian salah satu potensi untuk dikembangkan di Kota Padang Panjang, adalah usaha peternakan yang memang sudah banyak digeluti masyarakat. Diantaranya usaha peternakan sapi perah, dengan produk ikutan susu segar dan produk hilir berbagai produk yang dihasilkan dari susu sapi. Kemudian peternakan itik, perlu digalakkan untuk menjadi tambahan penghasilan bagi keluarga-keluarga miskin. Sedangkan untuk usaha peternakan kambing, memang butuh penanganan khusus, karena perlu strategi yang pas bila ingin hasilnya maksimal. Namun saat ini keberadaan usaha peternakan di Kota Padang Panjang masih belum nampak geliatnya dan belum unggul untuk kawasan Sumatera Barat. Hal ini dikarenakan pengelolaan peternakan sapi perah ini belum optimal.

4) Permasalahan dalam Pengembangan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta Bidang Industri

Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional seharusnya dapat menjadi rujukan terhadap berbagai permasalahan yang dialami oleh masyarakat dan dunia usaha. Terlebih bagi para anggotanya yang mendukung keberadaan koperasi, sehingga berbagai masalah yang berkaitan dengan pengembangan usaha setidaknya dapat diakomodir oleh koperasi.

Untuk saat ini keberadaan koperasi di Kota Padang Panjang masih belum berani melakukan ekspansi usaha di luar bidang usaha yang digelutinya. Padahal peluang untuk menambah unit-unit usaha baru terbuka luas. Keberadaan koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional sangat jelas yakni untuk meningkatkan kemampuan anggotanya secara maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan beberapa dorongan, penguatan permodalan, maupun perluasan kesempatan usaha bagi koperasi agar mampu berkembang dengan baik. Koperasi yang harus dikembangkan di Kota Padang Panjang adalah koperasi syariah. Namun saat ini sebagian dari koperasi belum berpola syariah.

Sedangkan usaha mikro, kecil dan menengah yang juga merupakan salah satu tugas pokok pemerintah untuk melakukan pembinaan. Keberadaan industri di Kota Padang Panjang juga belum optimal hasilnya, ada beberapa potensi industri yang perlu dikembangkan antara lain industri pengolahan susu, industri kulit yang pengembangannya belum dilakukan secara optimal sehingga belum begitu berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Berikut

permasalahan dibidang UMKM, Koperasi dan Industri antara lain : rendahnya tingkat penguasaan teknologi, keterbatasan jangkauan pemasaran produk, keterbatasan akses permodalan, kurang optimalnya pengembangan industri kulit yang merupakan salah satu sektor unggulan di Kota Padang Panjang, namun saat ini pengembangan sektor ini belum optimal.

b. Belum optimal upaya penurunan angka kemiskinan dan pengangguran selama periode 2013-2017.

Meskipun angka kemiskinan sudah berada dibawah angka kemiskinan provinsi Sumatera Barat, akan tetapi dilihat dari akselerasi penurunan angka kemiskinan Kota Padang Panjang ternyata masih lebih rendah dibandingkan dengan akselerasi penurunan angka kemiskinan di beberapa Kota di Sumatera Barat. Selanjutnya bila diperhatikan angka pengangguran di Kota Padang Panjang ternyata juga berfluktuasi dimana angkanya secara rata-rata juga masih lebih tinggi dari tingkat pengangguran di beberapa Kota di Sumbar. Kenyataan ini menurut informasi dari BPS Kota Padang Panjang, tingkat pengangguran tersebut adalah tingkat pengangguran terdidik dimana mereka cenderung untuk memilih lapangan pekerjaan.

c. Belum optimalnya kualitas layanan dan pemerataan pendidikan serta kesehatan.

Meskipun Kota Padang Panjang sudah sejak lama dijuluki sebagai kota pendidikan dan angka Wajib Sembilan Tahun sudah dapat dipenuhi, akan tetapi permasalahan pokok pada urusan pendidikan adalah belum meratanya kualitas pendidikan dan belum terpenuhinya kebutuhan dunia kerja. Belum maksimalnya pemerataan pendidikan disebabkan oleh tingginya permintaan masyarakat untuk masuk sekolah dengan kualitas bagus dan berlokasi di pusat kota, sedangkan di sisi lain masih banyak sekolah yang mengalami kekurangan siswa terutama sekolah swasta dan sekolah yang berada di lingkup Kementerian Agama.

Peningkatan pemerataan kualitas pendidikan diperlukan tidak hanya untuk sekolah negeri tetapi juga untuk pendidikan swasta terutama pendidikan swasta agama, sehingga pelayanan pendidikan terlihat tidak diskriminatif. Di samping itu program pembangunan urusan pendidikan selama periode RPJMD sebelumnya ternyata belum sepenuhnya dapat membentengi moral siswa, serta belum mampu memunculkan jiwa kewirausahaan terhadap peserta

didik. Hal ini terbukti dalam beberapa tahun terakhir ini terjadi perkelahian antar siswa serta belum berkembangnya jiwa kewirausahaan pada tamatan siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) tersebut.

Upaya pembangunan pendidikan melalui wajar 12 tahun sudah dimulai lima tahun yang lalu dan upaya ini harus terus ditingkatkan untuk masa yang akan datang meskipun saat ini kewenangan untuk pendidikan tingkat SMA berada di Propinsi. Permasalahan yang diidentifikasi di urusan pendidikan adalah belum meratanya kualitas lulusan pendidikan serta lulusan pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat (dunia kerja).

Adapun akar permasalahan belum optimalnya kualitas layanan dan pemerataan pendidikan di Kota Padang Panjang antara lain:

- 1) Masih relatif rendahnya kelayakan sarana dan prasarana terutama baik itu di tingkat SD maupun SD, hal ini dapat dilihat dari jumlah sarana dan prasarana pendidikan seperti perpustakaan, sarana olah raga dan laboratorium yang belum mencapai 100%.
- 2) Masih ada anak usia 2-6 tahun yang tidak mengikuti pendidikan anak usia dini, hal ini dapat dilihat dari APK dan APM Paud yang belum mencapai 100%

Sementara itu kualitas layanan kesehatan juga perlu lebih dioptimalkan. Kondisi ini disebabkan oleh terbatasnya personil baik dari kuantitas maupun kualitas layanan kesehatan. Selanjutnya masalah kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat selama ini dianggap capaiannya belum optimal. Terkait dengan target SDGs untuk Kota Padang Panjang pada urusan kesehatan terutama terkait dengan angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian ibu melahirkan dan prevalensi/angka balita kurang gizi dan penyakit menular pada umumnya sudah mencapai angka yang relatif rendah di Kota Padang Panjang dibanding daerah lain di Indonesia. Namun tetap harus menjadi perhatian ke depan untuk dapat semaksimal mungkin. Permasalahan lainnya bidang kesehatan ini adalah masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap arti pentingnya olahraga. Hal ini disebabkan karena belum adanya kuyalitas infrastruktur olah raga yang representative. Adapun akar permasalahan belum optimalnya kualitas layanan dan pemerataan kesehatan di Kota Padang Panjang antara lain:

- 1) relatif rendahnya kesadaran Perilaku Hidup Bersih dan Sehat masyarakat.
- 2) Masih adanya “*stunting*” (balita pendek) dan balita kurang gizi, dimana pada tahun 2015 angka *stunting* di Kota Padang Panjang sebesar 16,9%, tahun 2016 sebesar 15,6% dan tahun 2017 sebesar 19,6%.
- 3) Cakupan *Universal Coverage Immunisation* (UCI) belum optimal.
- 4) Belum optimalnya sarana prasarana kesehatan, hal ini dapat dilihat dari kondisi rumah sakit yang keberadaannya belum sesuai dengan masterplan yang telah disusun.

d. Belum optimalnya Penyelenggaraan tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih dalam rangka mendukung pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Dalam perwujudan *good government* di setiap lingkungan pemerintahan, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dan ditindaklanjuti dalam realisasinya yakni *accountability*, *transparency*, *predictability*, dan *participation*. Jika keseluruhan faktor tersebut dilaksanakan secara menyeluruh dan seksama maka dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan daerah akan berjalan pada koridor pencapaian pembangunan daerah sebagai pendukung peningkatan capaian kinerja pembangunan nasional.

Pembangunan berkelanjutan menjadi pokok perhatian dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Padang Panjang. Mencermati kinerja “tata kelola pemerintahan yang baik” di lingkungan Pemerintahan Kota Padang Panjang yang belum optimal, beberapa faktor penyebabnya dapat diidentifikasi antara lain: belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kompeten, bersih, dan bebas KKN; masih perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik; serta akuntabilitas kinerja yang belum memuaskan. Belum optimalnya akuntabilitas kinerja pemerintahan di Kota Padang Panjang dapat dilihat dari hasil penilaian sistim akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sakup) yang dalam beberapa tahun terakhir masih memperoleh predikat CC.

e. Belum Optimalnya Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, Adat dan Sosial Budaya.

Terkait dengan masalah aspek peningkatan kualitas kehidupan beragama, adat dan sosial budaya ada beberapa permasalahan antara lain:

- 1) Belum optimalnya kesadaran masyarakat dalam peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran beragama untuk menjaga kelangsungan dan kualitas masyarakat Kota Padang Panjang sebagai masyarakat kota Serambi Mekkah.
- 2) Belum optimalnya peran kelembagaan adat dan budaya dalam mendorong masyarakat untuk lebih memahami dan menerapkan nilai sosial dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat agar tidak terjadi pergeseran dan perubahan yang berdampak negatif terhadap kondisi social budaya masyarakat yang bercirikan ABS-SBK.
- 3) Belum optimalnya pengelolaan seni dan budaya serta aset daerah untuk mendukung pembangunan khususnya dalam pengembangan dan peningkatan daya saing pariwisata daerah.

f. Menurunnya Kualitas Lingkungan Hidup

Guna mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan maka permasalahan lingkungan hidup menjadi suatu hal yang harus menjadi perhatian, dengan semakin pesatnya pembangunan tentunya akan berdampak kepada kualitas lingkungan hidup, ada beberapa hal permasalahan lingkungan hidup di Kota Padang Panjang antara lain masih tingginya pencemaran air sungai. Indeks kualitas air kota Padang Panjang pada tahun 2017 menunjukkan angka 44,04. Angka ini menunjukkan kualitas air yang rendah disebabkan oleh pencemaran yang cukup. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini antara lain debit air sungai yang relatif kecil sementara material pencemar relatif tinggi dan beragam. Sumber pencemar yang cukup dominan antara lain limbah domestik, perdagangan, industri dan pertanian.

Permasalahan lainnya terkait lingkungan hidup adalah keterbatasan daya tampung TPA sampah. TPA Sampah Sungai Andok yang digunakan saat ini secara teknis telah melewati umur pakai. Namun, karena adanya program pengurangan sampah dari sumbernya, sampai saat ini TPA Sungai Andok masih bisa digunakan. Kedepannya perlu disiapkan lahan TPA baru sebagai pengganti TPA Sungai Andok. Permasalahan utama dari permasalahan lingkungan hidup ini adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Tingkat partisipasi masyarakat dan pengelolaan lingkungan dapat dilihat dari berbagai hal, diantaranya dalam pengurangan sampah dari sumbernya, penyediaan ruang terbuka hijau jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi ketentuan perizinan lingkungan,

penyediaan sarana pengolahan limbah domestik dan sebagainya. Keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan gotong royong juga dirasakan semakin berkurang. Disamping itu Indeks Kualitas Air (IKA) yang masih rendah (sebesar 44,02) juga dapat menjadi indikasi kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengelola sumber air terutama sungai.

g. Belum Optimalnya Pembangunan Tata Ruang Dan Penyediaan Infrastruktur Dasar

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi.

Pengembangan infrastruktur merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini mengingat dampaknya yang hampir memengaruhi indikator kunci keberhasilan pembangunan dasar, baik pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi.

Kondisi saat ini sebagian infrastuktur kota Padang Panjang belum sesuai dengan harapan misalnya dalam hal penyediaan air bersih yang belum menyentuh seluruh warga kota, tempat parkir yang sangat terbatas seeperti di pasar pusat, terminal yang belum berfungsi dengan baik, sistem drainase yang tidak baik sehingga sebagian wilayah kota Padang Panjang tergenang air jika terjadi hujan yang cukup lama, sistem air limbah kota yang belum terpadu. Permasalahan lainnya terkait infrastruktur kota juga belum adanya standarisasi dari infrastruktur, seperti trotoar yang tidak standar dan tidak ramah disabilitas dan lansia.

Permasalahan lain yang menjadi perhatian adalah terkait dengan tata ruang wilayah. Perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang yang baik menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan pengembangan wilayah. Masih belum optimalnya kesesuaian pemanfaatan ruang merupakan hal yang menjadi perhatian dalam lima tahun ke depan.

g. Daerah Rawan Bencana

Sebagaimana telah diuraikan pada kondisi umum daerah bahwa berdasarkan hasil kajian resiko bencana gempa bumi dan gunung berapi di Kota Padang Panjang, maka potensi bencana alam di Kota

Padang Panjang terdiri dari bencana gempa bumi dengan kerentanan resiko bahaya gempa bumi mulai dari rendah sampai sangat tinggi, selain itu Padang Panjang juga rentan terhadap bencana letusan gunung api dimana Sebagian besar wilayah Kota Padang Panjang termasuk dalam kawasan III (radius 8–14Km) bencana letusan gunung api berupa aliran lahar dan abu vulkanik. Selain itu Padang Panjang juga rentan terjadi Bencana Longsor (Gerakan Tanah). Bencana longsor di Kota Padang Panjang cukup sering terjadi terutama pada saat musim hujan pada daerah dengan kemiringan >40%.

4.2 Isu Strategis Pembangunan

Pernyataan isu-isu strategis memberikan gambaran tentang hal-hal yang menjadi fokus dan prioritas penanganan oleh pemerintah karena pengaruhnya yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada pembangunan masa mendatang. Isu-isu strategis merupakan isu-isu yang jika diprioritaskan antisipasi dan penanganannya maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan.

4.2.1 Isu Internasional

Isu strategis internasional merupakan suatu kondisi yang dialami secara global oleh seluruh negara di dunia dimana isu tersebut merupakan prioritas utama setiap negara dalam penyusunan rumusan kebijakan di negaranya masing-masing. Isu strategis internasional sebagian besar mengusung perihal degradasi kualitas lingkungan hidup hingga ancaman menipisnya sumber daya tak terbarui yang merupakan bahan bakar untuk energi. Isu strategis tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan masa mendatang bagi Kota Padang Panjang antara lain : pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), kondisi perekonomian global yang berpengaruh ke perekonomian nasional dan daerah, mitigasi perubahan iklim global (global

warning/climate change), serta kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang semakin pesat.

a. *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan global sebelumnya yaitu *Milenium Development Goals (MDG's)*, Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada tahun 2015 meluncurkan *Sustainable Development Goals (SDG's)* yang merupakan agenda global yang melanjutkan *MDGs*. *SDGs* tidak terpisah dari *MDGs* dan merupakan penyempurnaan dari *MDGs*. Bentuk penyempurnaan dilakukan melalui sejumlah pendekatan yang dipandang perlu dengan tetap melibatkan peran aktif warga dunia bagi terciptanya kepentingan global yang lebih luas. Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi agenda pembangunan dunia Post-2015 (*SDGs*). Sidang Umum PBB pada 4 Desember 2014 telah menyetujui platform agenda pembangunan dunia Post-2015 berdasar pada hasil *Open Working Group (OWG) on Sustainable Development Goals* yang akan menjadi target dan tujuan pembangunan dunia sampai 2030. Rumusan *SDG* terdiri dari 17 tujuan dan 169 target dimana pencapaian lebih terukur untuk menciptakan masyarakat dunia 2030 jauh lebih baik dari saat ini. Ke-17 tujuan *SDGs* tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Menghapus segala bentuk kemiskinan dimana pun berada;
- 2) Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan peningkatan gizi, dan mencanangkan pertanian berkelanjutan;
- 3) Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan penduduk di segala usia;
- 4) Menjamin kualitas pendidikan yang adil dan inklusif serta meningkatkan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua;
- 5) Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan;
- 6) Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkelanjutan dari air dan sanitasi untuk semua;
- 7) Memastikan seluruh penduduk mendapat akses untuk energi yang terjangkau, dapat diandalkan, dan berkelanjutan;
- 8) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, lapangan kerja yang penuh dan produktif, dan pekerjaan yang layak untuk semua secara berkelanjutan;
- 9) Membangun infrastruktur tangguh, mempromosikan industrialisasi inklusif berkelanjutan, dan inovasi asuh;
- 10) Mengurangi ketimpangan di dalam dan antar negara-negara;

- 11) Membuat pemukiman kota dan pemukiman manusia yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan;
- 12) Pastikan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan;
- 13) Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya;
- 14) Pelestarian dan pemanfaatan samudera, laut dan sumber daya kelautan berkelanjutan dalam rangka pembangunan berkelanjutan;
- 15) Melindungi, memulihkan dan mempromosikan pemanfaatan ekosistem darat, lestari mengelola hutan, memerangi penggusuran, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati;
- 16) Meningkatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses terhadap keadilan bagi semua, dan membangun institusi yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan; serta
- 17) Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Target pembangunan universal yang tertuang dalam SDGs membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat dunia, termasuk dari pemerintahan, Lembaga Swadaya Masyarakat, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat. Di setiap negara, tidak hanya negara miskin dan berkembang tetapi juga negara maju. Rumusan SDGs merupakan sumber penting untuk menyelaraskan strategi dan kebijakan demi membuat kehidupan di muka bumi menjadi lebih baik.

4.2.2 Isu atau Kebijakan Nasional

a. Telaahan RPJPN Tahun 2005-2025

Isu-isu secara nasional yang memiliki potensi besar untuk memengaruhi arah pembangunan Kota Padang Panjang pada masa mendatang adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Dokumen perencanaan tingkat nasional merupakan salah satu sumber kebijakan yang memiliki kepastian tinggi dan dalam amanat peraturan perundangan harus diikuti karena penyusunan RPJMD harus berpedoman pada RPJMN. Mengingat perodesasi RPJMD Kota Padang Panjang mengikuti periode RPJMN III, maka arah kebijakan RPJMD Kota Padang Panjang menyelaraskan dengan periode RPJMN III (2015- 2019) yang mengacu pada RPJPN tahap ketiga (2015-2019).

Arah kebijakan untuk RPJMN tahap III ditekankan pada pembangunan daya saing industri nasional untuk meningkatkan nilai tambah SDA, pembangunan kualitas SDM untuk meningkatkan produktivitas, dan penguasaan IPTEK untuk melahirkan inovasi. Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMN tahap III, ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

Kualitas sumber daya manusia terus mengalami perubahan positif yang ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; serta mantapnya budaya dan karakter bangsa.

Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan semakin efektif dan efisien yang dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup; meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat terhadap lingkungan hidup; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang di seluruh wilayah Indonesia.

Daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif dengan semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha; makin selarasnya pembangunan pendidikan, industri, ilmu pengetahuan dan teknologi; serta terlaksananya penataan kelembagaan ekonomi untuk mendorong peningkatan efisiensi, produktivitas, penguasaan, dan penerapan teknologi oleh masyarakat dalam kegiatan perekonomian.

Ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien sesuai kebutuhan sehingga elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat tercapai; mulai dimanfaatkan tenaga nuklir untuk pembangkit listrik dengan mempertimbangkan faktor keselamatan

secara ketat; terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia; terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air; serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Wilayah perdesaan merupakan titik vital pembangunan masyarakat ekonomi lemah. Oleh karena itu, pengembangan infrastruktur perdesaan harus terus dikembangkan terutama untuk mendukung pembangunan pertanian. Selain itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi sarana prasarana pendukung kehidupan bagi seluruh masyarakat harus terus ditingkatkan dengan didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang, berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Diharapkan, dengan terpenuhinya kondisi tersebut semakin mendorong terwujudnya kabupaten/kota tanpa permukiman kumuh.

Berdasarkan telaahan RPJPN tahap III (2015-2019), maka pembangunan Kota Padang Panjang harus selaras dengan arahan RPJPN tahap III dengan menyesuaikan karakteristik lokal seperti:

- 1) Meningkatkan daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat;
- 2) Pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari;
- 3) Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta
- 4) Semakin terpadunya industri manufaktur dengan pertanian, kelautan, dan sumber daya alam lainnya secara berkelanjutan untuk mendukung daya saing perekonomian Indonesia yang semakin kuat dan kompetitif.

b. Telaahan Visi dan Misi RPJMN 2015- 2019

Dalam merumuskan dan merealisasikan berbagai komitmen Presiden dan Wakil Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta berdasarkan kajian maupun analisis mengenai permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima

tahun ke depan, termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJP Nasional tahun 2005-2025, maka untuk memajukan Negara Indonesia ke depan ditetapkan visi RPJM Nasional tahun 2015-2019 adalah Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.

Gotong royong merupakan intisari dari ideologi Pancasila. Tanggung jawab untuk membangun bangsa harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat dalam memutuskan suatu perihal dan gotong royong dalam bekerja. Kekuatan rakyat adalah gotong royong, dimana rakyat selalu bahu membahu dan bekerjasama menyelesaikan berbagai hambatan dan tantangannya ke depan.

Berdaulat adalah hakikat dari kemerdekaan, yaitu hak setiap bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri dan menentukan apa yang terbaik bagi bangsanya sendiri. Oleh karena itu, pembangunan selain sebagai usaha untuk mewujudkan kedaulatan sebagai negara merdeka, pembangunan juga merupakan upaya membangun kemandirian. Bangsa yang berdaulat dan mandiri adalah bangsa yang mampu mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. Oleh karena itu, untuk membangun kemandirian diperlukan kekuatan dan kemampuan nasional di segala lini baik bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Kemandirian suatu bangsa tercermin antara lain pada ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunannya; kemandirian aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum dalam menjalankan tugasnya; kemampuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya ketergantungan kepada sumber luar negeri; dan kemampuan memenuhi kebutuhan pokok.

Kemandirian dalam kebudayaan harus dicerminkan dalam setiap aspek kehidupan baik hukum, ekonomi, politik, sosial budaya, maupun pertahanan keamanan. Kemandirian dan kemajuan suatu bangsa tidak boleh hanya diukur dari perkembangan ekonomi semata, namun kemandirian dan kemajuan juga tercermin dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik dan sosial. Secara lebih mendasar lagi, kemandirian sesungguhnya mencerminkan sikap seseorang atau sebuah bangsa mengenai jati dirinya, masyarakatnya, serta semangatnya dalam menghadapi berbagai tantangan.

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui Misi sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan;
- 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum;
- 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim;
- 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera;
- 5) Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
- 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berlandaskan kepentingan nasional; serta
- 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dalam rangka mencapai Visi dan Misi serta untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas. Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWACITA, yaitu :

- 1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga Negara;
- 2) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
- 3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia;
- 6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya;
- 7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
- 8) Melakukan revolusi karakter bangsa; serta
- 9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Dalam pelaksanaan agenda prioritas nasional tersebut, maka dirumuskanlah kebijakan pengembangan wilayah pulau-pulau besar

yang diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pembangunan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah sebagai satu kesatuan Negara yang berkeadilan.

Mengingat saat ini RPJMN tahun 2014-2019 hampir berakhir maka dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Padang Panjang juga memperhatikan RPJMN Teknokratik tahun 2020-2025. Dalam RPJMN teknokratik telah dirumuskan beberapa kebijakan pembangunan antara lain:

Arah Kebijakan Pembangunan Manusia :

- 1) Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial
- 2) SDM Berkualitas dan Berdaya Saing

Arah Kebijakan Pembangunan Ekonomi :

- 1) Pangan dan Pertanian
- 2) Energi, Mineral, dan Pertambangan
- 3) Kelautan dan Kemaritiman
- 4) Pariwisata
- 5) Ekonomi Kreatif dan Digital
- 6) Industri Manufaktur

Arah Kebijakan Pembangunan Infrastruktur :

- 1) Penyediaan Pelayanan Dasar Infrastruktur
- 2) Dukungan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK)

Arah Kebijakan Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan Keamanan :

- 1) Penguatan Implementasi Doktrin Poros Maritim Dunia yang lebih berorientasi keluar, seperti aktif dalam kerjasama negara-negara pesisir Samudera Hindia (IORA)
- 2) Penguatan Kepemimpinan pada forum internasional dan regional
- 3) Mengoptimalkan Peran Indonesia di Dewan HAM PBB dan di Dewan Keamanan PBB
- 4) Penguatan kapasitas mengantisipasi ancaman perang terbuka, narkoba, terorisme, dan bencana alam
- 5) Memperkuat aktualisasi ideologi negara
- 6) Penguatan kapasitas keamanan dalam negeri, termasuk pengamanan perbatasan antar negara

- 7) Penguatan lembaga-lembaga demokrasi, mengurangi biaya politik, dan penguatan desentralisasi
- 8) Penguatan peran serta *stakeholders* dalam kebijakan, perluasan kemitraan pembangunan (Prinsip *No One Left Behind*), dan peningkatan profesionalitas dan netralitas ASN
- 9) Penguatan penegakan hukum dengan mengoptimalkan *restorative justice*
- 10) Penguatan kapasitas pencegahan korupsi melalui penguatan pelaksanaan Stranas Pencegahan Korupsi

Arah Kebijakan Pembangunan Kewilayahan :

- 1) Pengembangan perdesaan, wilayah terdepan, terluar dan tertinggal.
- 2) Peningkatan sarana dan prasarana sosial-ekonomi di KTI dan daerah tertinggal lainnya.
- 3) Peningkatan konektivitas antar-wilayah
- 4) Optimalisasi dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, KSPN)
- 5) Peningkatan tata kelola dan kapasitas Pemda dan Pemdes (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur)
- 6) Percepatan pemenuhan SPM terutama di daerah tertinggal
- 7) Peningkatan inovasi pemerintahan daerah
- 8) Peningkatan kemudahan perizinan
- 9) Pengembangan kerja sama antar-daerah, kolaborasi multipihak serta meningkatkan kualitas SDM
- 10) Penataan pola hubungan Pusat dan Daerah
- 11) Peningkatan peran kota kecil-menengah dan pengendalian kota besar metropolitan
- 12) Penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan dan peningkatan kepastian hukum hak atas tanah

4.2.3 Isu atau Kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Penelaahan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Padang Panjang dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 bertujuan untuk menyelaraskan dan menjabarkan RPJMD Kota Padang Panjang sehingga dapat memberikan sumbangsih positif pada pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat. Sesuai dengan visi gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, maka visi pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 adalah “Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera”.

Misi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”.

Misi ini diarahkan untuk perubahan sikap mental yang lebih baik sesuai nilai-nilai agama, adat, budaya dan kearifan lokal ditengah kehidupan masyarakat, peningkatan kesalehan sosial, penguatan kelembagaan agama, adat dan budaya.

- b. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional. Misi ini diarahkan untuk membangun tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

- c. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman,berkarakter, dan berkualitas tinggi

Misi ini diarahkan untuk membangun sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter, berkualitas tinggi, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdaya saing dengan berlandaskan kesetaraan gender.

- d. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan daerah; Misi ini diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang lebih tinggi dan merata dengan mengembangkan kegiatan ekonomi yang lebih produktif berbasis kerakyatan, mendorong sektor unggulan daerah dan memanfaatkan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk yang berdaya saing.

- e. Meningkatkan infrastruktur dan pembangunan yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Misi ini diarahkan untuk penyediaan infrastruktur bagi peningkatan kegiatan ekonomi, pengembangan wilayah dan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan sesuai dengan tata ruang daerah.

Adapun isu strategis pembangunan daerah RPJMD Provinsi Sumatera Barat adalah :

- 1) Pembangunan mental dan peningkatan pengamalan nilai-nilai adat dan agama
- 2) Penanganan Bencana alam
- 3) Pengurangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antar daerah.

- 4) Penguatan struktur ekonomi daerah.
- 5) Penguatan infrastruktur
- 6) Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik
- 7) Peningkatan kualitas sumber daya manusia
- 8) Pemberdayaan usaha mikro kecil menengah dan koperasi
- 9) Peningkatan ketahanan pangan
- 10) Pemanfaatan potensi kelautan dan kemaritiman
- 11) Pengurangan pengangguran
- 12) Globalisasi dan peningkatan daya saing daerah
- 13) Peningkatan kualitas lingkungan hidup.

4.2.4 Hasil Telaahan RPJMD terhadap RTRW

Kajian RTRW terdiri dari kajian struktur ruang dan pola ruang yang bermuara pada indikasi program/kegiatan yang harus dilaksanakan oleh OPD terkait. Secara umum seluruh indikasi program yang sudah dirumuskan dalam RTRW Kota Padang Panjang tahun 2012-2032 sudah diakomodir dalam Indikasi program RPJMD Kota Padang Panjang tahun 2018-2023, baik secara langsung maupun yang tertuang dalam renstra OPD 2018-2023 sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Telaahan RTRW Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032

No	Indikasi Program RTRW	Indikasi Program RPJMD
1	TATA BATAS KOTA	Program Penataan Daerah Otonomi Baru (Renstra Setdako)
2	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG KOTA	
a	Perwujudan sistem pusat pelayanan: Penyusunan RDTR	Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
b	Perwujudan sistem jaringan prasarana transportasi :	
	✓ Pengembangan Jaringan Jalan : - Jalan Lingkar Barat - Jalan Lingkar Selatan	Program Peningkatan struktur dan kapasitas Jalan : - Jalan Lingkar Selatan
	✓ Pengembangan sistem terminal	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ : Kegiatan Peningkatan Pengelolaan Terminal Angkutan Darat (Renstra Dinas Perhubungan)
	✓ Pengembangan sarana & prasarana angkutan umum	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (Renstra Dinas Perhubungan)
	✓ Pengembangan Sistem Perpajakan	Program Pembangunan sarana dan prasarana publik : Pembangunan Gedung Parkir Program Peningkatan Pelayanan Angkutan (Renstra Dinas Perhubungan)

No	Indikasi Program RTRW	Indikasi Program RPJMD
c	Sistem jaringan sumber daya air	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan jaringan Pengairan Lainnya
d	Perwujudan infrastruktiur perkotaan:	
	✓ Air Bersih & Air Limbah	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
	✓ Persampahan	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan
	✓ Drainase	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong (Renstra Dinas PUPR) Pembangunan drainase lingkungan permukiman (Renstra Dinas Perkim LH)
	✓ Pedestrian	Program Pembangunan trotoar : Pedestrian Ramah disabilitas
	✓ Jalur evakuasi bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam (Renstra BPBD)
	✓ Bencana Kebakaran : Penyusunan RISPK	Program Pencegahan Dini dan kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana (Renstra BPBD) Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran (Renstra Pol PP Damkar)
2	PERWUJUDAN POLA RUANG KOTA	
a	Perwujudan kawasan lindung :	
	✓ Kawasan Rawan Longsor	Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	✓ Kawasan Perlindungan Setempat : Sempadan sungai, sempadan rel kereta, sempadan SUTT	Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
	✓ RTH	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
b	Perwujudan kawasan budidaya:	
	✓ Penataan kawasan perumahan baru, Penataan lingkungan perumahan kumuh dan Peningkatan lingkungan perumahan	Program Bangunan Tempat Tinggal dan Pemberdayaan Komunitas Permukiman
	✓ Pembangunan, revitalisasi dan optimalisasi fungsi kawasan perdagangan dan jasa	Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
	✓ Peningkatan kualitas dan optimalisasi fungsi kawasan perkantoran	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	✓ Pengembangan, revitalisasi dan optimalisasi fungsi kawasan industri	Pengembangan sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Kecil Menengah
	✓ Peningkatan kualitas dan optimalisasi fungsi kawasan Pendidikan	Program Peningkatan Standarisasi Sarana Prasarana Pendidikan
	✓ Peningkatan kualitas dan optimalisasi fungsi kawasan peribadatan	Program koordinasi dan pembinaan kegiatan keagamaan, Sosial dan budaya
	✓ Intensifikasi kawasan persawahan	Program Peningkatan Ketahanan Pangan

No	Indikasi Program RTRW	Indikasi Program RPJMD
	✓ Intensifikasi kawasan peternakan	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	✓ Intensifikasi kawasan perkebunan	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan (Renstra Dinas Pangan Pertanian)
	✓ Intensifikasi kawasan perikanan	Program Pengembangan Budidaya Perikanan
	✓ Pengembangan ruang terbuka non hijau (pedestrian, plaza, kolam, dll)	Program Pembangunan sarana dan prasarana publik
	✓ Penetapan dan sosialisasi ruang evakuasi bencana	Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam (Renstra BPBD)
	✓ Penetapan dan pengelolaan ruang sektor informal	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
3	PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KOTA	
	Penyusunan RDTR Kawasan Strategis	Program Perencanaan, Penataan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Rincian kegiatan berdasarkan program-program dimaksud akan dijabarkan detail dalam Renstra Perangkat Daerah Kota Padang Panjang.

4.2.5 Hasil telaahan KLHS RPJMD Kota Padang Panjang 2018-2023

Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan salah satu upaya untuk memastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD. TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorangpun yang terlewatkan atau “*No-one Left Behind*”.

Penyusunan RPJMD Kota Padang Panjang sudah mengakomodir hasil analisa dan rekomendasi KLHS mulai dari penyusunan isu strategis sampai ke penyusunan tujuan, sasaran, arah kebijakan dan program. Beberapa rekomendasi berupa kegiatan akan ditindaklanjuti dalam penyusunan renstra Organisasi Perangkat Daerah terkait.

Ringkasan telaahan KLHS RPJMD Kota Padang Panjang dapat digambarkan dalam skema berikut :

Tabel 4.2
Telaahan KLHS RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

No	Isu KLHS	Kondisi Daerah Bab II	Isu RPJMD Bab IV	Tujuan Sasaran (Bab V)	Strategi dan Arah Kebijakan (Bab VI)	Program /Kegiatan (Bab VII/Renstra)
I	Ketersediaan SDA a. Kualitas dan Kuantitas Air b. Alih Fungsi Lahan	Gambaran Kinerja urusan lingkungan hidup, termasuk kualitas air dan penanganan sampah	Kualitas Lingkungan Hidup	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	Strategi: Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Arah Kebijakan - Pemantapan pembangunan infrastruktur strategis kota yang bersih, indah nyaman untuk mendukung produktifitas ekonomi - Pembangunan dengan kesesuaian tata ruang - Peningkatan Kesiapsiagaan dan Penanggulangan Bencana Alam	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan - Program perencanaan, penataan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang - Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Penataan RTH
II	Konsumsi SDA : sampah					
III	Pencapaian TPB					
	Tujuan 2 : Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan	Kinerja urusan pertanian	Pertumbuhan ekonomi	Tujuan : Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	Strategi: Peningkatan produktivitas sektor pertanian:	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Ketahanan Pangan, Program Peningkatan Produksi pertanian / perkebunan, Peningkatan produksi sub sektor peternakan

No	Isu KLHS	Kondisi Daerah Bab II	Isu RPJMD Bab IV	Tujuan Sasaran (Bab V)	Strategi dan Arah Kebijakan (Bab VI)	Program /Kegiatan (Bab VII/Renstra)
				Sasaran: Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	Arah Kebijakan Peningkatan produksi sub sektor pertanian tanaman pangan dan sentra tanaman hias Peningkatan produksi sub sektor peternakan	- Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	Tujuan 3 :Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia	Kinerja layanan kesehatan	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	Tujuan: Meningkatnya Pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul Sasaran: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Strategi : Peningkatan Kualitas Pelayanan kesehatan Arah Kebijakan : Gerakan Padang Panjang Sehat	- Program Pemasyarakatan Olah Raga; - Program Upaya Kesehatan Masyarakat, - Program Pembekalan Gizi Masyarakat - Program peningkatan kualitas sarana dan prasarana Rumah Sakit Umum Daerah
	Tujuan 4 :Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua	Kinerja urusan pendidikan	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat	Tujuan: Meningkatnya Pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul Sasaran: Meningkatnya Pemerataan kualitas dayasaing pendidikan	Strategi: - Meningkatkan Budaya Baca - Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Pendidikan - Standarisasi infrastruktur dan akses pelayanan yang terbuka dan setara	- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, - Program Padang Panjang Juara - Program Waji Belajar Dasar 9 Tahun - Program Pendidikan Anak Usia Dini - Program Pendidikan Non Formal

No	Isu KLHS	Kondisi Daerah Bab II	Isu RPJMD Bab IV	Tujuan Sasaran (Bab V)	Strategi dan Arah Kebijakan (Bab VI)	Program /Kegiatan (Bab VII/Renstra)
						- Program Peningkatan Standarisasi Sarana Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan
	Tujuan 6 :Air Bersih dan Sanitasi	Kinerja Urusan Kesehatan Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Pembenahan dan peningkatan kualitas Infrastruktur Kota	Tujuan: Meningkatnya Pemerataan dan kualitas daya saing SDM yang sehat, berakhlak dan unggul Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan Sasaran: - Peningkatan Kualitas Pelayanan kesehatan - Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	Strategi: Peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan Arah Kebijakan: - Gerakan Padang Panjang Sehat - Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana pelayanan kesehatan - Pemantapan pembangunan infrastruktur strategis kota yang bersih, indah nyaman untuk mendukung produktifitas ekonomi	- Program Pengembangan Lingkungan Sehat - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
	Tujuan 11 :Kota Inklusif dan Berkelanjutan	Fokus Fasilitas Wilayah/ Infrastruktur	Pembenahan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur	Tujuan: Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	Strategi: Peningkatan kualitas infrastruktur berkelanjutan	- Program Pembangunan Trotoar trotoar ramah disabilitas, - Peningkatan Pelayanan Angkutan : Smart Bus

No	Isu KLHS	Kondisi Daerah Bab II	Isu RPJMD Bab IV	Tujuan Sasaran (Bab V)	Strategi dan Arah Kebijakan (Bab VI)	Program /Kegiatan (Bab VII/Renstra)
				<p>Sasaran: Meningkatnya kualitas infrastruktur berkelanjutan</p> <p>Tujuan: Terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis</p> <p>Sasaran: Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial</p>	<p>Arah Kebijakan: Pemantapan pembangunan infrastruktur strategis kota yang bersih, indah nyaman untuk mendukung produktifitas ekonomi</p> <p>Strategi: Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitas Sosial</p> <p>Arah Kebijakan: Gerakan Kota Sayang Lansia dan Ramah Disabilitas</p>	Program Sayang Lansia dan Disabilitas
	Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	Kinerja urusan pertanian	Pertumbuhan Ekonomi	<p>Tujuan: Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan</p> <p>Sasaran: Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan</p>	<p>Strategi: Peningkatan produktivitas sektor pertanian</p> <p>Arah Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan produksi sub sektor pertanian tanaman pangan dan sentra tanaman hias - Peningkatan produksi sub sektor peternakan 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Ketahanan Pangan - Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan - Program Pengembangan Budi Daya Perikanan - Program Peningkatan Produksi Peternakan

No	Isu KLHS	Kondisi Daerah Bab II	Isu RPJMD Bab IV	Tujuan Sasaran (Bab V)	Strategi dan Arah Kebijakan (Bab VI)	Program /Kegiatan (Bab VII/Renstra)
	Tujuan 15 :Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat	Kinerja urusan lingkungan hidup	Kualitas Lingkungan Hidup	Tujuan: Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan	Strategi : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Arah Kebijakan: Pengendalian kualitas lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan kapasitas pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam - Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Perkotaan - Program perencanaan, penataan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang - Program Peningkatan Ketahanan Pangan (terkait LP2B)
	Tujuan 17 :Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan	Kinerja urusan penanaman modal	Pertumbuhan Ekonomi	Tujuan: Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan Sasaran : Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	Strategi : meningkatkan peluang investasi; Arah Kebijakan: Fasilitasi kemudahan investasi	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

No	Isu KLHS	Kondisi Daerah Bab II	Isu RPJMD Bab IV	Tujuan Sasaran (Bab V)	Strategi dan Arah Kebijakan (Bab VI)	Program /Kegiatan (Bab VII/Renstra)
IV	Kemandirian Daerah	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi	<p>Tujuan: Meningkatnya perekonomian daerah yang berkelanjutan</p> <p>Sasaran: Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan</p>	<p>Strategi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan produktivitas sektor perdagangan, - Peningkatan produktivitas sektor industri, koperasi dan UMKM - Meningkatnya jumlah wirausaha - Peningkatan produktivitas sektor penyediaan akomodasi dan makan minum/pariwisata - Peningkatan produktivitas sektor pertanian, <p>Arah Kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan pengelolaan pasar, pedagang, dan barang beredar - Penguatan industri kulit, pengolahan susu dan makanan ringan - Penguatan sektor UMKM 	<ul style="list-style-type: none"> - Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam Negeri - Program Pengembangan sistim pendukung usaha bagi Usaha Kecil Menengah - Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi - Program Pengembangan Rumah Wirausaha - Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata - Program Pengembangan Destinasi Pariwisata - Program Peningkatan Produksi pertanian / perkebunan - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan - Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

No	Isu KLHS	Kondisi Daerah Bab II	Isu RPJMD Bab IV	Tujuan Sasaran (Bab V)	Strategi dan Arah Kebijakan (Bab VI)	Program /Kegiatan (Bab VII/Renstra)
					<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan peran koperasi syariah dalam pengembangan ekonomi - Pengembangan wisata dan kuliner (edu-eco-culture tourism) - Penyelenggaraan even tahunan Gelar Karya dan Prestasi Warga “Pesona Padang Panjang Kota serambi Mekkah” - Peningkatan produksi sub sektor pertanian tanaman pangan dan sentra tanaman hias - Peningkatan produksi sub sektor peternakan - Fasilitasi kemudahan investasi 	

4.3 Isu Strategis Kota Padang Panjang

Berdasarkan hasil telaahan terhadap isu internasional, isu dan kebijakan nasional, isu dan kebijakan Provinsi Sumatera Barat, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Padang Panjang dan telaahan RTRW, maka isu dan kebijakan serta permasalahan pembangunan yang ada selama beberapa periode pembangunan perlu dikaji kembali untuk penetapan isu strategis Kota Padang Panjang pada pelaksanaan pembangunan periode 2018-2023 sebagai berikut :

1) Pertumbuhan Ekonomi

Bila diperhatikan perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang secara rata-rata selama periode 2013-2017 tampaknya berada diatas laju pertumbuhan ekonomi rata-rata Provinsi Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan kinerja pengelolaan sumber daya ekonomi Kota Padang Panjang lebih bagus dibandingkan dengan kinerja pengelolaan sumber daya ekonomi Sumatera Barat. Akan tetapi perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang berfluktuasi selama periode 2013-2017.

Pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang mencapai sebesar 6,29%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat hanya sebesar 6,02%. Kemudian pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang mengalami penurunan sampai tahun 2016 dimana hanya mencapai sebesar 5,80%, sedangkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat ternyata juga turun menjadi 5,40%. Pada tahun 2017 perkonomian Kota Padang Panjang naik kembali menjadi 5,81% dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat juga naik menjadi 5,69%.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang naik menjadi 5,81% pada tahun 2017 dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumbar naik menjadi 5,69% ternyata akselerasi kenaikan pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat sedikit lebih baik dibandingkan dengan akselerasi pertumbuhan ekonomi Kota Padang Panjang.

2) Peningkatan dan Pengembangan Urusan kepariwisataan, Perdagangan,

Urusan kepariwisataan yang mulai menggeliat dalam beberapa tahun terakhir ini, tampaknya masih perlu pembenahan dan pengembangan lebih lanjut untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah di tingkat regional, nasional maupun internasional.

Kota Padang Panjang harus memiliki karakter dan ciri yang kuat sebagai daerah wisata. Karena itu citra kota sebagai “Serambi Mekah” harus terus dibangun dan dikembangkan serta dijadikan ikon

pariwisata daerah yang diikuti dengan upaya pembenahan berbagai destinasi wisata yang potensial serta dukungan sarana dan prasarananya. Selanjutnya salah satu sarana pariwisata yang perlu dibangun dan dikembangkan adalah “*Rest Area*”.

Dalam upaya peningkatan daya saing daerah, bidang usaha perdagangan perlu mendapat perhatian sebagai bagian dari isu strategis kota. Hal ini dikarenakan posisi Kota Padang Panjang yang strategis dan memiliki potensi ekonomi yang layak untuk dikembangkan. Untuk itu pengembangan pasar rakyat yang modern dan nyaman harus dilakukan sejalan dengan peningkatan kualitas pelaku usaha lokal, agar mereka mampu bersaing dengan pelaku ekonomi dari daerah lainnya.

Pengelolaan pasar secara profesional oleh pelaku yang kompeten juga menjadi salah satu kondisi yang harus dipenuhi dan menjadi perhatian serius agar pasar yang moderen, aman dan nyaman mampu diwujudkan sebagai ikon kota dalam menghadapi persaingan pasar regional dan nasional .

3) Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah, Koperasi Syariah dan industri

Pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah dan koperasi (UMKMK) menjadi isu pembangunan Kota Padang Panjang karena bahagian besar yang menggerakkan ekonomi Padang Panjang adalah usaha mikro kecil menengah dan koperasi syariah. Jika UMKM tidak mengalami perkembangan, maka perlambatan pertumbuhan ekonomi akan terjadi di Padang Panjang. Oleh sebab itu isu pemberdayaan UMKM dan koperasi syariah perlu dikaitkan dengan peningkatan daya saing dan produktivitas, pembenahan manajemen, dan kelembagaan, penguasaan teknologi, inovasi dan diversifikasi produk, peningkatan akses produk dan perluasan pasar, dukungan dan fasilitas dari pemerintah. Bidang industri juga menjadi isu pembangunan Kota Padang Panjang, mengingat ada beberapa sektor unggulan yang perlu menjadi perhatian dalam bidang industri yakni industri pengolahan susu dan industri kulit yang merupakan potensi untuk dikembangkan.

4) Penurunan Angka Pengangguran Dan Kemiskinan Serta Peningkatan Daya Saing Kota

Angka pengangguran yang cukup tinggi di Kota Padang Panjang menyebabkan angka kemiskinan juga meningkat. Untuk itu perlu peningkatan efisiensi serta perbaikan dalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan minat kewirausahaan terutama kaum muda guna peningkatan kualitas tenaga kerja sehingga hal tersebut secara langsung dapat menurunkan tingkat pengangguran dan sekaligus meningkatkan daya saing kota. Disamping itu pelatihan untuk

meningkatkan kemampuan dan keahlian (skill) bagi para penganggur terdidik juga perlu dilakukan.

Masalah kemiskinan juga masih menjadi isu strategis baik di daerah maupun nasional, karena masih banyak penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Untuk itu, pada lima tahun ke depan, masalah kemiskinan tetap menjadi isu strategis di Kota Padang Panjang, sehingga nantinya dibutuhkan berbagai program dan kegiatan pengentasan kemiskinan harus diluncurkan untuk menekan angka kemiskinan tersebut.

Sementara itu bila diperhatikan dari sisi daya saing Kota Padang Panjang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang cenderung meningkat dalam 3 tahun terakhir meskipun dunia mengalami krisis ekonomi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa produk-produk asal Kota Padang Panjang masih sulit bersaing di pasar lokal maupun nasional. Berkaitan dengan hal itu peningkatan akses untuk mendapatkan modal serta peningkatan kualitas SDM bagi UMKM dan Koperasi serta pelaku ekonomi lainnya di Kota Padang Panjang perlu dilakukan dalam periode lima tahun mendatang.

5) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Derajat Kesehatan Masyarakat

Karena masih belum optimalnya capaian kinerja urusan pendidikan, maka perlu upaya Pemda untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan pemerataan akses melalui pemenuhan suprastruktur dan infrastruktur dengan jalan meningkatkan manajemen pendidikan, mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat disemua jalur, jenjang dan satuan pendidikan.

Bantuan peningkatan manajemen untuk pendidikan swasta khususnya manajemen pendidikan sekolah islam perlu lebih ditingkatkan di masa yang akan datang. Peningkatan kualitas pendidikan diselenggarakan secara integral oleh institusi pendidikan, pengguna dan Pemerintah Daerah untuk mencapai kualitas sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Untuk urusan kesehatan belum terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dan merata membutuhkan upaya untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara lebih mandiri, yang diikuti oleh peningkatan akses dan peningkatan kualitas serta kuantitas pelayanan kesehatan untuk setiap lapisan masyarakat secara merata di seluruh wilayah Kota Padang Panjang.

6) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan isu strategis yang pertama di Kota Padang Panjang, paradigma pemerintahan disadari telah bergeser dari *rule government* menjadi *good governance*. Membangun *good governance* bukan hanya semata-mata memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah membangun etika, sikap dan perilaku penyelenggara pemerintahan.

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang dimaksud meliputi aspek transparansi pemerintahan, profesionalitas aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lainnya. Reformasi birokrasi adalah upaya pokok yang perlu segera dilakukan dalam periode 5 tahun mendatang.

Pengelolaan tata pemerintahan yang baik, harus dimulai dari tata kelola sumber daya manusianya, karena sebaik apapun sistem yang dibuat, kalau SDM tidak memadai tetap akan menjadi sebuah kendala besar. Input terhadap sebuah subjek, akan sangat menentukan kepada *output* dan *outcome*. Jadi manajemen sumber daya Aparatur Sipil Negara (ASN) haruslah prima. Baru setelah itu pola tata kelola dan sarana prasarana akan mendukung semakin mantapnya jalan roda pemerintahan yang tentu saja akan sangat berdampak besar terhadap pembangunan.

Selanjutnya penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan memuaskan kepada masyarakat. Untuk itu kesiapan beberapa faktor pendukung penerapan teknologi informasi berupa sumber daya manusia, sarana dan prasarana teknologi informasi serta partisipasi *stakeholder* lainnya.

Belum efektif dan efisiennya penyelenggaraan kelembagaan pemerintahan di Kota Padang Panjang, juga disebabkan oleh struktur organisasi pemerintah daerah yang belum sepenuhnya menganut sistem hemat struktur kaya fungsi. Kemudian permasalahan yang juga muncul adalah masih adanya sebagian tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang saling tumpang tindih. Hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga pemerintahan, termasuk antar pemerintah daerah juga masih belum optimal.

Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah daerah, baik dari segi jumlah, profesionalisme serta kesejahteraan yang terbatas menyebabkan belum optimalnya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Dari sisi pengelolaan keuangan daerah, ditunjukkan oleh belum fokus dan optimalnya pemanfaatan sumber-

sumber penerimaan daerah, belum efektifnya prioritas alokasi belanja daerah secara proporsional.

Akhirnya, reformasi birokrasi merupakan perubahan signifikan elemen-elemen birokrasi, antara lain kelembagaan, sumber daya aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan dan pelayanan publik. Hal yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir dan pengembangan budaya kerja.

7) Pemahaman dan implementasi pengamalan agama dan budaya

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa Kota Padang Panjang selama ini sudah terkenal dengan julukan “Kota Serambi Mekah”. Kenyataan ini haruslah didukung dengan kondisi masyarakat yang memiliki pemahaman yang utuh tentang agama, budaya dan adat. Pemahaman agama, budaya dan adat tersebut ditujukan untuk meningkatkan akhlak dan moral masyarakat Kota Padang Panjang.

Meskipun selama ini kegiatan keagamaan dan budaya telah berkembang dengan baik di tengah masyarakat, namun dalam implementasinya ternyata dinamika sosial bergerak sangat cepat dan dinamis. Hal ini terbukti masih adanya kenakalan remaja serta belum optimalnya pemahaman dan pengamalan para generasi muda terhadap agama dan adat istiadat. Disamping itu dengan diberlakukannya MEA serta dalam era globalisasi sekarang ini maka pengaruh budaya asing yang kontra produktif sangat cepat masuk dan berkembang di tengah masyarakat melalui berbagai media.

Oleh karena itu, aspek ini perlu diberikan penekanan dan perhatian utama guna dijadikan dasar untuk menyusun strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang baik dalam rangka mewujudkan Kota Padang Panjang sebagai Kota Serambi Mekah dengan basis sumber daya manusia yang religius dan berbudaya sebagaimana diharapkan dalam pembangunan jangka panjang. Berkaitan dengan hal itu maka dalam penyusunan RPJMD ini perlu dioptimalkan mengenai pemahaman dan implementasi pengamalan agama dan adat istiadat tersebut terutama bagi generasi muda.

8) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Penurunan kualitas lingkungan hidup dipengaruhi oleh penurunan kualitas air sungai, rendahnya proporsi Ruang Terbuka Hijau, berkurangnya area resapan, rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup di Kota Padang Panjang mengindikasikan pengelolaan lingkungan yang belum

optimal. Oleh karena itu diperlukan upaya terpadu dan perubahan perilaku yang mendasar dari masyarakat. Upaya ini perlu diperkuat dengan mekanisme pengawasan dan Penegakan Peraturan hukum yang berlaku (Perda Trantibum dan Perda Bangunan).

9) Pembenahan dan peningkatan kualitas infrastruktur kota

Infrastruktur kota dalam konteks ini adalah segala struktur yang berwujud fisik yang digunakan untuk menopang kegiatan masyarakat Kota Padang Panjang sehingga dapat menekan inefisiensi dari aktivitas masyarakat dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tersedianya infrastruktur kota yang baik diharapkan mampu untuk meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga sekaligus juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Padang Panjang.

Kondisi saat ini sebagian infrastuktur Kota Padang Panjang belum sesuai dengan harapan misalnya dalam hal penyediaan air bersih yang belum menyentuh seluruh warga kota, tempat parkir yang sangat terbatas seperti di pasar pusat, terminal yang belum berfungsi dengan baik, trotoar yang belum layak dan belum ramah disabilitas, sistem drainase yang tidak baik sehingga sebagian wilayah Kota Padang Panjang terdapat genangan air jika terjadi hujan yang cukup lama, sistem air limbah kota yang belum terpadu, tempat pembuangan sampah yang belum dikelola dengan baik, infrastruktur kawasan perdagangan dan jasa seperti pasar pusat yang belum optimal, trotoar yang belum baik, pasar sayur Bukit Surungan yang belum jelas status pengelolaannya adalah bagian dari isu strategis infrastruktur Kota Padang Panjang yang perlu di di benahi dalam 5 tahun kedepan.

Khusus untuk infrastruktur sanitasi diperlukan adanya perubahan perilaku mendasar dari masyarakat seperti dalam pengelolaan sampah diperlukan perubahan paradigma “kumpul-angkut-buang” menjadi 3R (*reduce, reuse, recycle*). Perubahan perilaku tersebut dapat dilakukan melalui edukasi secara berkesinambungan. Hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur adalah ketersediaan master plan untuk masing-masing sektor lapangan usaha perekonomian.

10) Penataan Ruang Kota

Sebagai kota yang cukup strategis dan terletak di jalur perlintasan, namun dibatasi oleh luas wilayah yang sangat kecil, penambahan penduduk adalah sesuatu yang sulit dihindari. Untuk menyikapi hal ini, tentu saja diperlukan kebijakan penataan ruang kota yang mampu mengakomodir kebutuhan seluruh stakeholder kota. Pemerintah Kota Padang Panjang harus menyediakan sarana dan

prasarana perkotaan dan aksesibilitas yang merata ke seluruh wilayah kota. Oleh sebab itu, kedepan diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Pengembangan ruang kota yang dapat menampung fungsi kota sekaligus mampu menjadi ciri khas Kota Padang Panjang, baik untuk fungsi pendidikan, perdagangan, pariwisata, industri, pemerintahan maupun permukiman;
- b. Peningkatan nilai ekonomi kota melalui pengembangan fungsi-fungsi ekonomi khusus seperti pengembangan kawasan industri kapur, kawasan industri kulit, makanan ringan, destinasi wisata baru, rest area dan sentra oleh-oleh serta pengembangan jasa pendukung pariwisata lainnya.

11) Aspek Pembangunan Pengarusutamaan Gender.

Suatu hal yang tidak bisa dipungkiri bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini Isu Gender merupakan salah satu isu yang cukup strategis dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Terkait dengan hal itu, Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai stakeholders bertanggung jawab untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Kesetaraan Gender itu. Sebab sampai sekarang ini masih terjadi ketidakstabilan gender yang dialami perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara termasuk di kota Padang Panjang. Padahal di kota Padang Panjang jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan boleh dikatakan hampir seimbang jumlahnya. Jauh sebelumnya Bappenas (2010) mengemukakan bahwa salah satu tujuan pembangunan manusia (*human development*) adalah untuk mencapai Kesetaraan Gender dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan.

Sehubungan dengan hal itu, maka Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap tahap pelaksanaan pembangunan terutama dalam proses perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan publik sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar aspirasi dan kepentingan perempuan juga tertampung dalam proses maupun dalam pelaksanaan pembangunan, sebab PUG bertujuan agar perempuan memiliki kesempatan dan akses yang sama dengan laki-laki terhadap proses dan hasil pembangunan. Oleh karena itu maka dalam penyusunan dokumen RPJMD Kota Padang Panjang periode 2018-2023 ini Isu Gender perlu dimasukkan, sehingga Kesetaraan Gender yang diharapkan dapat diwujudkan dimasa mendatang.

12) Penanganan Bencana Alam

Kota Padang Panjang yang termasuk daerah rawan terhadap berbagai bencana alam dapat menghambat percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Posisi demografis kota

Padang Panjang yang terletak di daerah patahan, daerah kelerengan dan ketinggian menyebabkan padang Panjang harus siap dengan segala akibat apabila terjadi bencana alam. Untuk mempersiapkan diri ketika terjadi bencana maka dalam dokumen perencanaan perlu dijadikan salah satu isu strategis terkait dengan penanganan bencana agar Kota Padang Panjang memang tanggap terhadap pengurangan resiko bencana, penanggulangan bencana dan pemulihan daerah yang terkena bencana.

Untuk melihat bagaimana keterkaitan dan keselarasan antara RPJMD Kota Padang Panjang, RPJMD Propinsi Sumatera Barat terutama berkaitan dengan isu strategis masing masing, serta bagaimana keselarasan dengan SDGs dan Nawacita dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 4.3
Keselarasan antara RPJMD Kota Padang Panjang, RPJMD Provinsi Sumbar dengan SDGs dan Nawacita

RPJMD Kota Padang Panjang	RPJMD Provinsi Sumatera Barat	SDGs	Nawacita
9) Pemahaman dan implementasi pengamalan agama dan budaya	1) Pembangunan Mental Pengamalan Agama dan ABS-SBK Dalam Kehidupan Masyarakat	3) Kesehatan dan Kesejahteraan 4) Kualitas Pendidikan yang baik 11) (Pembangunan Berkelanjutan	8) Melakukan revolusi karakter bangsa
1) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	2) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Pemerintahan	17	3) Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya 4) Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya
3) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan Masyarakat	3) Peningkatan Pemerataan dan Kualitas Pendidikan	3) Kesehatan dan Kesejahteraan	5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

RPJMD Kota Padang Panjang	RPJMD Provinsi Sumatera Barat	SDGs	Nawacita
3) Peningkatan Kualitas Pendidikan dan derajat Kesehatan Masyarakat	4) Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat	3) Kesehatan dan Kesejahteraan	5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
2) Pertumbuhan Ekonomi	5) Peningkatan Produksi Untuk Mendukung Kedaulatan Pangan Nasional dan Pengembangan Agribisnis	2) Mengakhiri Kelaparan 3) Kesehatan dan Kesejahteraan	5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
5) Peningkatan dan Pengembangan Urusan Kepariwisata dan Perdagangan	6) Pengembangan Pariwisata, Industri, Perdagangan, Koperasi, UMKM, dan Peningkatan Investasi	1>>10	6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya
	7) Peningkatan Pemanfaatan Potensi Kemaritiman dan Kelautan	1>>5 8) Pertumbuhan Ekonomi 9) Inovasi dan Infrastruktur 12) Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan	7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestic
4) Penurunan Angka Pengangguran dan Kemiskinan serta peningkatan daya saing kota	8) Penurunan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran serta Penanganan Daerah Tertinggal	1>>11	2) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan
7) Pembenahan dan peningkatan kualitas infrastruktur Kota	9) Pengembangan Sumber Energi Baru dan Terbarukan serta Pembangunan Infrastruktur	3) Kesehatan dan Kesejahteraan	5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia
6) Kualitas Lingkungan Hidup	10) Pelestarian Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	3) Kesehatan dan Kesejahteraan	5) Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia

RPJMD Kota Padang Panjang	RPJMD Provinsi Sumatera Barat	SDGs	Nawacita
12) Aspek Pembangunan Pengarus utamaan gender		3) Kesehatan dan Kesejahteraan 10) Mengurangi Ketimpangan 16) Perdamaian dan Keadilan 17) Revitalisasi dan Kemitraan Global	1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara
		5) Kesetaraan Gender 10) Mengurangi Ketimpangan 16) Perdamaian dan Keadilan 17) Revitalisasi dan Kemitraan Global	9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia